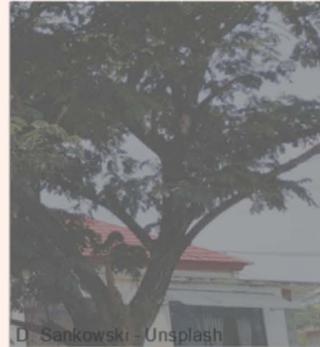


INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN CIANJUR

2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

**KABUPATEN
CIANJUR**

2021



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cianjur 2021

Nomor Publikasi : 32030.2236
Katalog BPS : 4102004.3203
Ukuran Buku : 17 x 25 cm
Jumlah Halaman : vi + 52 halaman

NASKAH:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Cianjur

PENYUNTING:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Cianjur

GAMBAR KULIT:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Cianjur

DITERBITKAN OLEH:

BPS Kabupaten Cianjur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN CIANJUR 2021

Penanggungjawab : Dani Jaelani, S.Si.,M.T.

Editor : Dani Jaelani, S.Si.,M.T.
Nur Putri Cahyo Utami, SST, M.P.P.

Penulis : Bayu Bastian Jumena, SST

Pengolah Data/
Penyiapan Draft : Seksi IPDS BPS Kabupaten Cianjur
Bayu Bastian Jumena, SST

<https://cianjur.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena perkenan-Nyalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cianjur Tahun 2021 telah selesai. Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Cianjur yang mencakup bidang Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Pengeluaran Rumah Tangga dan Sosial Ekonomi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat terselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Cianjur, September 2022
Kepala BPS Kabupaten Cianjur,



Dani Jaelani, S.Si.,M.T.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	li
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	vi
1. KEPENDUDUKAN.....	1
2. KESEHATAN.....	9
3. PENDIDIKAN.....	20
4. KETENAGAKERJAAN.....	27
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	32
6. PERUMAHAN.....	37
7. SOSIAL LAINNYA	42

DAFTAR TABEL

KEPENDUDUKAN	halaman
1.1 Jumlah, laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin, 2019-2021.....	3
1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan menurut jenis kelamin Tahun 2021.....	5
1.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama dan Wilayah, 2021.....	6
1.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2021.....	7
 KESEHATAN	
2.1 Angka Kesakitan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan 2021.	12
2.2 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2020 dan 2021.....	14
2.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2021.....	15
2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2021.....	16
2.5 Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir Menurut Karakteristik, 2021.....	17
2.6 Tabel 2.6. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2021.....	18

	halaman
PENDIDIKAN	
3.1 Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Cianjur 2018 s.d 2021.....	23
3.2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021.....	24
3.3 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah tertinggi yang Dimiliki, 2021	25
 KETENAGAKERJAAN	
4.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Karakteristik, Cianjur 2021	29
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur, 2021.....	29
4.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur 2021.....	30
4.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur, 2021.....	31
 TARAF DAN POLA KONSUMSI	
5.1 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Cianjur Menurut Pengeluaran Tahun Cianjur 2017-2021 (Juta Rupiah).....	33
5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2021.....	35

PERUMAHAN		halaman
6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2021.....	39
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2021.....	39
6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2021.....	40
 SOSIAL LAINNYA		
7.1	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2021.....	43
7.2	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Program Perlindungan Sosial menurut Karakteristik Tahun 2020.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah, laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin, 2019-2021.....	11
----------	---	----

<https://cianjurkab.bps.go.id>

BAB I KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu komponen penting pembangunan nasional. Jika dilihat dari peranannya, penduduk memiliki fungsi sebagai produsen yang menghasilkan barang bernilai ekonomi sekaligus sebagai konsumen hasil produksi barang ekonomi tersebut. Apabila penduduk berperan maksimal dalam kegiatan perekonomian maka sektor ekonomi akan semakin bergairah. Dampak langsung dari hal ini adalah meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga proses ini diharapkan dapat menjadi mata rantai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menyokong ibukota negara Indonesia, oleh sebab itu Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang merasakan langsung dampak positif maupun negatif dari pembangunan yang dilakukan DKI Jakarta. Begitu pula dengan Kabupaten Cianjur yang memiliki peran sebagai salah satu perlintasan Bandung menuju Jakarta, ditambah kini sedang dilakukan kajian pembangunan jalan tol Bekasi-Bandung. Hal ini memberikan berbagai macam dampak bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Cianjur sebagai kota yang dilalui jalur perlintasan tersebut. Selain dampak positif, dampak negatif yang tak dapat terhindar juga terasa, seperti semakin banyak pencari kerja yang keluar dari Cianjur karena akses yang mudah.

Series data kependudukan diperlukan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Jawa Barat dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.437.838 jiwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ke-10 Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dari 27 Kabupaten Kota.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 sebesar 2,92 persen dan ditahun sebelumnya tercatat 3,33 persen. Salah satu faktor yang menjadi penyebab fenomena ini karena di tahun tersebut terjadi pandemi, sehingga sebagian besar perusahaan dan instansi menerapkan sistem kerja *work from home* (WFH) begitu juga dengan para pelajar yang melakukan pembelajaran dari rumah, ditambah banyak para pekerja yang mengalami PHK sehingga jumlah masyarakat yang pulang dari perantauan cukup tinggi.

Penduduk merupakan pelaku usaha sekaligus pengguna barang dan jasa . Keberhasilan kebijakan dalam kependudukan sangat menentukan kondisi perekonomian dan kesejahteraan penduduk.

Tabel I.1. Jumlah, laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin, 2019-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	2.292.366	1,29	106,6
2020	2.368.613	3,33	105,6
2021	2.437.838	2,92	105,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur

Di Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk perkecamatan tertinggi yaitu Kecamatan Sukaluyu (2,63 persen) diikuti Kecamatan Karangtengah (2,31 persen). Sedangkan kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Campakamulya (0,90 persen). Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk antar kecamatan cenderung merata pada tahun 2021.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, secara rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 sebesar 105,4. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Cianjur lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

I.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Cianjur paling banyak berada di Kecamatan Cianjur (173.265 Jiwa) atau 6,96 persen dari total penduduk Kabupaten Cianjur, diikuti Kecamatan Karangtengah (167.398

jiwa) atau 6,68 persen, dan Kecamatan Cibeber (135,484 jiwa) atau 5,40 persen. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Campakamulya (24.015 jiwa) atau sebesar 0,96 persen.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Cianjur terjadi di Kecamatan Cianjur dengan angka 6.625 penduduk per km², diikuti Kecamatan Karangtengah 3.386 penduduk per km², dan Kecamatan Pacet 2.663 penduduk per km². Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Naringgul dengan 168 penduduk per km².

Beberapa permasalahan sosial ekonomi yang dapat muncul di wilayah dengan jumlah penduduk yang besar diantaranya meningkatnya jumlah pengangguran karena kekurangan ketersediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman yang tinggi, hingga tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal banya sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.2. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan menurut jenis kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)
0-14	638.006	
15-64	1.718.902	43,09
65+	149.774	

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Angka beban tanggungan di Kabupaten Cianjur sebesar 43,09 pada tahun 2021. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 43 penduduk tidak produktif. Angka tahun 2021 ini menurun jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 51,88 dan hal ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

1.4 Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk adalah tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, besar kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Dan hal tersebut dapat digambarkan dengan semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 19 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Tabel 1.3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama dan Wilayah, 2021

Kabupaten	Umur Kawin Pertama	
	< 19 Tahun	≥ 19 Tahun
(1)	(2)	(3)
Bogor	40,37	59,63
Sukabumi	53,61	46,39
Cianjur	65,21	34,79
Bandung	38,62	61,38
Garut	54,49	45,51
Tasikmalaya	53,33	46,67
Jawa Barat	42,04	57,96

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut dan Tasikmalaya Tahun 2021

Meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, tidak sedikit penduduk Indonesia yang melakukan perkawinan sebelum usia yang sudah diatur dalam undang-undang. Secara rata-rata, persentase perempuan pernah kawin di Jawa Barat yang melakukan perkawinan sebelum umur 19 tahun sebanyak 42,04 persen. Sementara itu, persentase perempuan pernah kawin

yang kawin sebelum umur 19 tahun di Kabupaten Cianjur lebih tinggi baik dengan kabupaten perbatasan maupun rata-rata provinsi. Sebanyak 65,21 persen perempuan pernah kawin di Kabupaten Cianjur melakukan perkawinan pertama sebelum usia 19 tahun.

Tabel 1.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2021

Karakteristik	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	33,86	61,24	4,90
Perempuan	22,45	64,27	13,28
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	28,66	61,63	9,72
40 Persen Tengah	28,18	63,96	7,86
20 Persen Teratas	27,96	62,34	9,71
Cianjur	28,32	62,71	8,97

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur 2021

Pada 2021, sebanyak 61,24 persen penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Cianjur berstatus kawin, sebanyak 33,86 persen berstatus belum kawin, dan 4,90 persen sisanya berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Sedangkan untuk penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas, sebanyak 64,27 persen berstatus menikah, 22,45 persen berstatus belum kawin, dan 13,28 persen sisanya berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, penduduk yang masuk kategori 40 persen terbawah memiliki persentasi tertinggi pada angka perceraian dengan 9,72 persen, diikuti penduduk dengan kategori 20 persen teratas dengan 9,71

persen dan kategori 40 tengah memiliki persentase terendah. Sedangkan untuk status belum kawin, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki persentase tertinggi dengan angka 28,66 persen, diikuti dengan kategori 40 persen tengah dengan 28,18 persen, dan yang terakhir kategori 20 persen teratas dengan 27,96 persen.

<https://cianjurkab.bps.go.id>

BAB II KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan publik bidang kesehatan, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

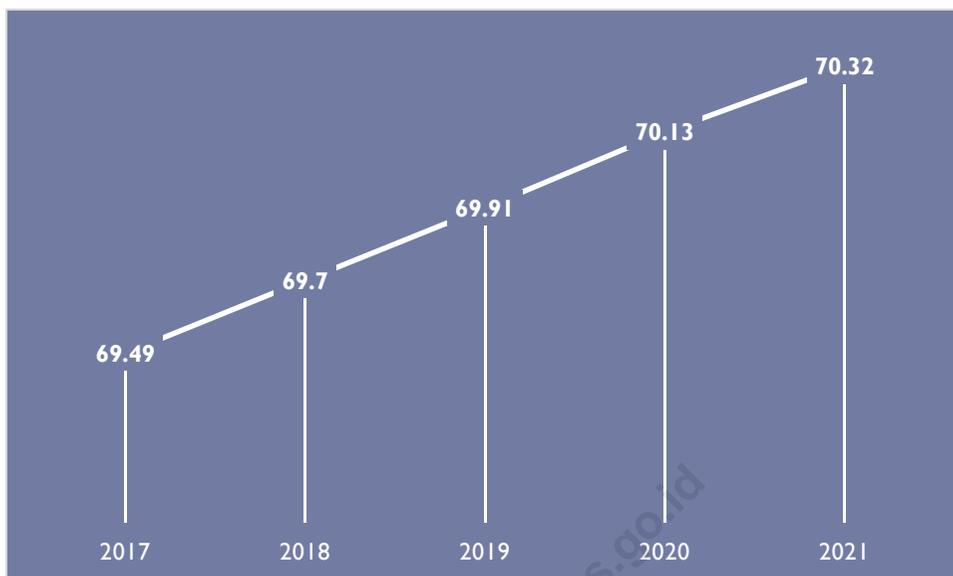
Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan lain-lain.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Berdasarkan sumber data analisis angka harapan hidup, Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Cianjur telah diiringi dengan peningkatan angka harapan hidupnya, tercatat dari sejak tahun 2010 sampai dengan 2021 angka harapan hidup selalu meningkat.

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.



Gambar 1. Angka Harapan Hidup Kab. Cianjur 2021

Angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan di lima tahun terakhir dengan angka 69,49 pada tahun 2017; 69,70 pada tahun 2018; 69,91 pada tahun 2019; pada tahun 2020 sebesar 70,13; dan pada tahun 2021 mencapai angka 70,32. Angka memiliki arti anak yang lahir pada tahun 2021 memiliki angka harapan hidup hingga 70 tahun. Akan tetapi angka ini masih dibawah rata-rata umur harapan hidup Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan yang mencapai angka 73 tahun.

Indikator lain yang dapat dilihat untuk menunjukan keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan adalah angka morbiditas (angka kesakitan). Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu

penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Cianjur 2021

Karakteristik	Angka Kesakitan	Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	14,84	18,89
Perempuan	14,88	19,09
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	15,99	25,91
40 Persen Tengah	15,24	15,37
20 Persen Atas	11,85	13,14
Cianjur	14,86	18,99

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Dari angka diatas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2021, sebanyak 14,86 persen dari seluruh penduduk Cianjur pernah mengalami keluhan kesehatan, dengan 18,99 persen diantaranya menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat jalan. Bila dilihat lebih lanjut penduduk dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase sedikit lebih tinggi dengan angka 14,88 persen dibanding penduduk laki-laki yang memiliki angka 14,84 persen.

Lebih jauh, penduduk dengan karakteristik kelompok pengeluaran terbawah memiliki persentase angka kesakitan dan persentase penduduk yang menggunakan jasa kesehatan untuk berobat jalan paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya dengan angka 15,99 dan 25,91 persen diantaranya menggunakan

jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Dan penduduk dengan karakteristik kelompok pengeluaran teratas memiliki persentase angka kesakitan terendah dengan 11,85 persen, cukup jauh dari kategori lainnya dan hanya 13,14 persen yang menggunakan jaminan kesehatan.

2.2. Tingkat Imunitas Balita

Ibu yang sedang mengandung harus memperhatikan asupan yang dimakannya dan melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian setelah sang anak lahir, memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi sangat dianjurkan, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak dan memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang sang anak. Hal ini dikarenakan ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan hingga 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain, setelah bayi berusia 6 bulan keatas dapat dilanjutkan bersamaan dengan makanan tambahan, dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 anak tahun.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2020 dan 2021

Karakteristik	Persentase Baduta Pernah Diberi ASI		Rata-rata Lama Pemberian ASI 2021
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis kelamin			
Laki-laki	94,41	94,13	11,16
Perempuan	95,46	95,21	9,53
Cianjur	94,92	94,63	10,40

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dan 2021

Pada tahun 2021 sebanyak 94,63 persen anak usia 0 sampai dengan 23 bulan pernah diberi ASI, turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka 94,92 persen. Apabila dirinci berdasarkan jenis kelamin maka persentase balita perempuan yang pernah diberi ASI 95,21 persen dari keseluruhan balita perempuan usia 0-23 bulan dan sebanyak 94,13 persen untuk balita laki-laki. Sedangkan untuk rata-rata lamanya pemberian ASI di Kabupaten Cianjur adalah 10 bulan, dan jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, balita laki-laki rata-rata diberikan ASI selama 11 bulan sedangkan balita perempuan 9 bulan. Angka ini menunjukkan kesadaran masyarakat cukup tinggi bahwa ASI merupakan kebutuhan penting bayi. Walaupun seorang ibu dianjurkan menyusui bayinya hingga berumur dua tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/ proteksi yang lebih baik.

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Terdapat dua jenis imunisasi yaitu

imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapatkan Imunisasi Lengkap
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	86,48	58,67
Perempuan	84,15	62,32
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD Ke Bawah	82,71	61,75
SMP Ke Atas	89,14	58,60
Cianjur	85,33	60,47

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui pada tahun 2021 persentase balita di Cianjur yang memiliki kartu imunisasi adalah 85,33 persen dan yang mendapat imunisasi lengkap sebesar 60,47 persen. Berdasarkan jenis kelamin, balita dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase yang lebih rendah dalam kepemilikan kartu imunisasi dengan 84,15 persen, akan tetapi bila dilihat dari sisi balita yang mendapat imunisasi lengkap persentasenya lebih tinggi

dibanding balita dengan jenis kelamin laki-laki yang mencapai angka 62,32 persen. Bila dilihat lebih lanjut balita dengan karakteristik KRT berpendidikan SD ke bawah memiliki persentase yang lebih rendah dari sisi kepemilikan kartu imunisasi yaitu 82,71 persen akan tetapi memiliki persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap yang lebih tinggi dengan 61,75 persen.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2021

Karakteristik	Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	77,17	72,88	75,04	56,93	70,65
Perempuan	74,83	71,56	78,77	53,57	71,26
Cianjur	76,02	72,23	76,87	55,27	70,95

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Pada tahun 2021 dari total balita yang ada persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG sebanyak 76,02 persen, DPT 72,23 persen, polio 76,87 persen, campak 55,27 persen, dan Hepatitis B 70,95 persen. Balita dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapat imunisasi memiliki persentasi lebih tinggi dibanding balita dengan jenis kelamin perempuan untuk beberapa jenis imunisasi seperti BCG 77,17 persen, DPT 72,88 persen, dan imunisasi Campak 56,93 persen. Imunisasi campak merupakan jenis imunisasi yang paling rendah tingkat penggunaannya dibandingkan dengan jenis imunisasi lain dan yang tertinggi adalah imunisasi Polio.

Tabel 2.5. Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir Menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Berat Badan Bayi Lahir (kg)		
	< 2,5	≥ 2,5	Tidak Ditimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	14,20	81,72	4,07
Perempuan	9,87	77,83	12,30
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	14,40	79,99	5,61
40 Persen Tengah	14,56	80,78	4,66
20 Persen Teratas	11,61	86,22	2,17
Cianjur	13,92	81,47	4,60

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Lebih dari delapan puluh persen bayi yang dilahirkan oleh wanita usia 15-49 tahun selama dua tahun terakhir sudah memenuhi standar berat badan bayi lahir normal yaitu lebih dari atau sama dengan 2,5 kilogram. Namun masih terdapat 13,92 persen bayi yang dilahirkan dengan berat lahir di bawah 2,5 kg. Bila dilihat dari sudut pandang kelompok pengeluaran, 40 persen dengan pengeluaran tengah memiliki persentasi tertinggi untuk kelahiran bayi dengan berat badan dibawah 2,5 kg, diikuti dengan kelompok pengeluaran kategori 40 persen terbawah dan di posisi terendah yaitu kelompok pengeluaran 20 persen teratas dengan angka 11,61 persen, cukup jauh dengan kategori lainnya.

Berat bayi lahir yang kurang dari 2,5 kg dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab, di antaranya gangguan kesehatan saat ibu hamil, kekurangan asupan nutrisi saat proses kehamilan, ataupun terdapat gangguan kesehatan

pada ibu hamil. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang rutin dan berkualitas selama prose kehamilan.

2.3. Pemanfaatan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam proses persalinan salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan oleh tenaga medis dikategorikan paling ideal karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitas tenaga kesehatan. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa.

Tabel 2.6. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Pernah Melahirkan di Faskes
(1)	(2)
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	49,47
SMP ke atas	68,93
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	47,71
40 Persen Tengah	72,36
20 Persen Teratas	65,93
Cianjur	60,31

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Terdapat 60,31 persen perempuan pernah kawin yang melahirkan di fasilitas kesehatan, dengan perempuan pendidikan tertinggi SMP ke atas memiliki persentase lebih tinggi. Sedangkan berdasarkan karakteristik kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran 40 persen tengah memiliki persentase tertinggi dengan penggunaan fasilitas kesehatan untuk persalinan, dan yang terendah kelompok pengeluaran terbawah.

<https://cianjurkab.bps.go.id>

BAB III PENDIDIKAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar serta daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan

3.1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling - EYS*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan.

**Tabel 3.1. Angka Harapan Lama Sekolah dan
Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Cianjur
2018 s.d 2021**

Indikator Pendidikan	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
Angka Harapan Lama Sekolah	11,90	11,98	11,99	12,00
Rata-rata lama sekolah	6,93	6,97	7,18	7,19

Sumber: BRS IPM Jawa Barat Tahun 2021

Angka harapan lama sekolah di kabupaten Cianjur pada tahun 2021 mengalami kenaikan tipis menjadi 12,00 dibanding tahun sebelumnya. Artinya pada tahun 2021 lamanya sekolah yang diharapkan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas adalah 12,00 tahun atau setara dengan bersekolah sampai lulus SMA. Sama halnya dengan Angka Harapan Lama sekolah, Rata-rata Lama Sekolah pada periode yang sama pun mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 adalah 7,19 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 rata-rata bersekolah selama 7,19 tahun atau setara dengan kelas I SMP. Peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di kabupaten Cianjur menuju ke arah yang lebih baik.

3.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk

bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021

Karakteristik	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	0,90	35,20	18,79	10,22	34,89
Perempuan	0,13	35,45	14,63	12,73	37,06
Kelompok Pengeluaran					
40 Persen Terbawah	0,76	37,48	14,32	8,90	38,53
40 Persen Tengah	0,46	34,17	18,96	13,26	33,15
20 Persen Teratas	0,19	33,00	17,62	13,03	36,16
Cianjur	0,30	35,32	16,80	11,42	35,93

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Penduduk usia 7-24 tahun di Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 yang berstatus masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat adalah sebesar 35,32 persen, jenjang SMP/ sederajat sebesar 16,80 persen, dan SMA/ sederajat 11,42 persen.

Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SD/ sederajat berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Sedangkan untuk jenjang SMA/ sederajat, persentase tertinggi berada pada kategori kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan yang terendah adalah kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Terdapat 0,53 persen penduduk umur 7-24 tahun

yang tidak/belum pernah sekolah, dengan persentase tertinggi berada pada kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (0,76 persen).

Persentase terbesar untuk status tidak bersekolah lagi berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Besar persentase tersebut tidak berbeda jauh dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Besaran persentase kedua kelompok tersebut lebih besar dari persentase status tidak bersekolah lagi di kabupaten Cianjur secara keseluruhan.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2021

Karakteristik	Tidak punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ Sederajat	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	9,73	49,70	21,31	19,26
Perempuan	13,20	48,83	23,56	14,41
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	17,65	52,55	21,46	8,33
40 Persen Tengah	8,15	52,82	22,67	16,36
20 Persen Teratas	6,41	36,75	23,57	33,27
Kabupaten Cianjur	11,42	49,28	22,40	16,90

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat 49,28 persen penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Cianjur berijazah SD/ sederajat. Pendidikan tertinggi kedua terbanyak adalah SMP/ Sederajat sebesar 22,40 persen disusul oleh SMA ke atas di tempat ketiga sebesar 16,90 persen. Masih terdapat 11,42 persen penduduk Kabupaten Cianjur yang berusia di atas 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran 20 pesen teratas memiliki persentasi lulusan SMA keatas tertinggi dengan 33,27 persen, walaupun tidak dapat dipungkiri dengan pengeluaran yang tergolong tertinggi 6,41 persen diantaranya masih belum memiliki ijazah. Untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah kebanyakan penduduknya memiliki ijazah tertinggi SD sederajat (52,55 persen).

<https://cianjurkab.bps.go.id>

BAB IV KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam

kerja, persentase pekerja anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

4.1. Angkatan kerja dan pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja (penduduk bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Karakteristik, Cianjur 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	768.382	407.503	1.175.885
Bekerja	681.448	384.875	1.066.323
Pengangguran Terbuka	76.394	33.168	109.562
Bukan angkatan kerja	113.619	440.309	553.928
Penduduk Usia Kerja	891.461	838.352	1.729.813

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov.Jawa Barat Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu terdapat sebanyak 1.066.323 orang atau 88,95 persen dari total angkatan kerja. Bila berdasarkan jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin perempuan memiliki persentase penduduk kerja yang lebih tinggi dengan 94,44 persen, sedangkan laki-laki 88,69 persen.

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur, 2021

Karakteristik	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)
Cianjur	9,32	67,98

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov.Jawa Barat Agustus 2021

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kabupaten Cianjur pada tahun 2021 adalah sebesar 67,98 persen dan dapat diartikan dari 100 penduduk usia kerja terdapat 69 orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Bila dilihat lebih jauh, penduduk bekerja didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 63,91 persen sedangkan perempuan bekerja sebesar 36,09 persen.

4.2. Lapangan usaha dan status pekerjaan

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan maka sektor Jasa menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 442.489 orang disusul pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 388.474 orang. Salah satu penyebab dua sektor ini banyak menyerap tenaga kerja karena lapangan pekerjaan ini sesuai dengan kondisi sosial dan geografi Cianjur yang memiliki sawah cukup luas dan karakteristik penduduk yang lebih banyak bekerja di bidang non formal (pedagang dan penyedia jasa lainnya). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan paling banyak bekerja di bidang jasa.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur 2021

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
Pertanian	251.595	136.879	388.474
Industri Pengolahan	166.266	69.094	235.360
Jasa	263.587	178.902	442.489
Jumlah/Total	681.448	384.875	1.066.323

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov. Jawa Barat Agustus 2021

4.3. Jenis Pekerjaan Utama

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur, 2021

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	131.842	63.829	195.671
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	128.796	48.748	177.544
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	46.072	5.952	52.024
Buruh/Karyawan/Pegawai	171.170	96.069	267.239
Pekerja bebas di pertanian	75.698	49.590	125.288
Pekerja bebas di non pertanian	87.695	14.106	101.801
Pekerja keluarga/tak dibayar	40.175	106.581	146.756
Jumlah/Total	681.448	384.875	1.066.323

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov. Jawa Barat Agustus 2021

Jika melihat status pekerjaan maka tenaga kerja di Cianjur paling banyak bekerja sebagai buruh dan karyawan yaitu sebanyak 267.239 orang, berusaha sendiri sebanyak 195.671 orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 177.544 orang, dan yang lainnya pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tetap, dan pekerja tidak dibayar. Tingginya status pegawai, buruh, dan karyawan menunjukkan bahwa tenaga kerja di kabupaten Cianjur mulai banyak di serap sektor industri. Kebijakan pemerintah daerah yang membuka ruang investasi di sektor industri cukup berdampak pada perekonomian di Kabupaten Cianjur.

BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Cianjur Menurut Pengeluaran Tahun Cianjur 2017-2021 (Miliar Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	31.607,52	33.280,74	36.111,19	36.226,78	37.476,11
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	86,01	106,83	114,40	111,84	115,46
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.956,90	3.160,55	3.280,70	3.276,76	3.445,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.674,53	11.637,13	12.114,61	11.143,62	12.410,21
Perubahan Inventori	1.313,07	1.381,79	1.406,89	557,24	(278,12)
Net Ekspor Barang dan Jasa	(8.063,03)	(6.595,80)	(6.069,94)	(3.787,27)	(3.031,39)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	38.575,00	42.971,25	46.957,85	47.529,00	50.137,7

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kab.Cianjur Menurut Pengeluaran 2017-2021

Berdasarkan tabel 5.1 konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Cianjur sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tingkat kehidupan masyarakat Cianjur semakin menuju arah yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan. Pada tahun 2021 kebutuhan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Cianjur mencapai 74,75 persen dari total PDRB Cianjur.

5.2 Struktur Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non makanan (non pangan). Pengeluaran rumah tangga sering digunakan sebagai proksi dari pendapatan rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Tabel 5.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2021

	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-Rata Pengeluaran
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Padi-padian	62.594	70.751	95.803	72.505
2.	Umbi-umbian	4.218	8.008	14.540	7.800
3.	Ikan	17.471	37.226	83.735	38.638
4.	Daging	12.584	27.952	81.927	32.613
5.	Telur dan susu	12.536	23.076	46.814	23.614
6.	Sayur-sayuran	20.198	38.965	79.275	39.531
7.	Kacang-kacangan	6.476	11.183	20.799	11.226
8.	Buah-buahan	9.428	20.914	54.068	22.959
9.	Minyak dan kelapa	8.139	13.245	22.650	13.086
10.	Bahan minuman	11.707	18.860	33.013	18.833
11.	Bumbu-bumbuan	5.118	10.932	23.597	11.143
12.	Bahan makanan lainnya	6.688	12.359	23.806	12.383
13.	Makanan minuman jadi	71.986	158.820	348.555	162.083
14.	Rokok dan tembakau	41.497	90.806	185.542	90.055
	Jumlah Makanan	290.642	543.098	1.114.122	556.468
15.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	84.491	191.387	489.159	208.258
16.	Aneka barang dan jasa	31.472	78.967	247.139	93.645
17.	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	10.617	26.469	72.019	29.250
18.	Barang tahan lama	4.500	16.456	140.531	36.518
19.	Pajak, pungutan dan asuransi	10.171	20.262	66.579	25.500
20.	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2.688	9.589	24.472	9.809
	Jumlah Bukan Makanan	143.939	343.129	1.039.899	402.979
	Jumlah Pengeluaran Kabupaten Cianjur	434581	886.228	2.154.021	959.447

Sumber : Statkesra Kab.Cianjur Tahun 2021

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di kabupaten Cianjur pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 959.447,- yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 556.468,- dan Rp. 402.979,- untuk pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 2021, pengeluaran makanan mencakup 57,99 persen dari seluruh pengeluaran, dengan 29,13 persen diantaranya merupakan pengeluaran untuk sub kelompok Makanan dan Minuman Jadi. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, pengeluaran tertinggi dipegang oleh sub kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga dengan persentasi 51,68 persen.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah terdapatnya perbedaan yang tinggi antara rata-rata pengeluaran antara kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan 20 persen teratas yang gapnya mencapai Rp. 1.719.440,- (Rp. 434.581,- kelompok 40 persen terbawah berbanding Rp. 2.154.021,- kelompok 20 persen teratas)

BAB VI PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan

Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian.

berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2021

Kabupaten	Sendiri	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Bogor	83,56	16,44	100
Sukabumi	86,65	13,35	100
Cianjur	80,39	19,61	100
Bandung	84,25	15,75	100
Garut	76,78	23,22	100

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut Tahun 2021

Terlihat dari Tabel 6.1. seluruh kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur memiliki persentase lebih dari 70 persen. Berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar ada sebanyak 80,39 persen penduduk memiliki dan menggunakan sendiri fasilitas buang air besar, 19,61 persen menggunakan MCK lainnya. Jika dibandingkan dengan Hal ini dapat menjadi perhatian karena faktor ini bisa menjadi salah satu penyebab tersebarnya penyakit menular, terutama di kondisi pandemi yang terjadi dua tahun terakhir.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2021

Karakteristik	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		Jumlah
	Tangki Septik/IPAL/SPAL	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bogor	56,77	43,23	100
Sukabumi	60,02	39,98	100
Cianjur	53,80	46,20	100
Bandung	68,74	31,26	100
Garut	44,43	55,57	100

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut Tahun 2021

Berdasarkan fasilitas tempat pembuangan akhir tinja, sekitar 53,80 persen menggunakan tanki septik/IPAL/SPAL dan 46,20 persen membuang dengan cara lainnya. Bila dilihat berdasarkan angka tersebut, maka di tahun 2021 Cianjur mengalami peningkatan dalam penggunaan fasilitas untuk pembuangan akhir tinja, hal ini penting mengingat hal tersebut sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/dll, Tahun 2021

Karakteristik	Sumber Air MCK Utama				Lainnya
	Ledeng	Sumur bor/ Pompa	Sumur/ Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bogor	3,92	35,03	26,82	5,21	0,36
Sukabumi	6,32	22,84	50,12	18,71	2,02
Cianjur	5,32	22,25	53,76	14,04	4,63
Bandung	6,95	53,07	35,91	3,14	0,93
Garut	3,55	14,45	54,19	21,90	5,90

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, sumber air utama yang digunakan masyarakat Cianjur untuk mencuci/mandi/dll tertinggi yaitu berasal dari sumur/mata air terlindung (sebanyak 49,89 persen), lalu diposisi kedua (22,25 persen), dan diposisi akhir yaitu sumber lainnya (4,63 persen).

Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman dipengaruhi kondisi fisik, kimia, dan biologis di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan pemukiman serta persyaratan

rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan permahan berpengaruh sangat besar terhadap peniingkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat (Sanropie, 1992).

<https://cianjurkab.bps.go.id>

BAB VII SOSIAL LAINNYA

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

7.1. Akses Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya.

Perkembangangaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi

Tabel 7.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2021

Karakteristik	Menggunakan HP/ Telepon Seluler/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	Mengakses Internet termasuk Facebook, Instagram, Twitter, BBM, WA, dll)
(1)	(2)	(3)
Bogor	74,86	61,27
Sukabumi	72,51	54,55
Cianjur	78,07	54,11
Bandung	81,45	75,68
Garut	70,24	51,16

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut Tahun 2021

Alat yang sering digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi adalah telepon selular dan laptop. Pada tahun 2021 di Kabupaten Cianjur tercatat 78,07 persen anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler/nirkabel/computer/laptop, dan sebanyak 44,20 persennya mengakses internet termasuk menggunakannya untuk mengakses sosial media. Masih terdapat beberapa wilayah Cianjur selatan yang kesulitan sinyal sehingga berpengaruh pada minimnya akses internet.

7.2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan hal penting di masyarakat, Keberadaan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menjadikan perlindungan sosial masih diperlukan. Dalam undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan

menangani guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan diarahkan adar masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.

Beberapa bentuk perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Tahun 2020

Jenis Program Perlindungan Sosial (1)	Persentase Rumah tangga yang menerima (2)
Raskin/Rastra/BPNT	27,90
Program Indonesia Pintar (PIP)	9,37
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	16,14
Program Keluarga Harapan (PKH)	19,88

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jenis bantuan dengan persentasi tertinggi yang diterima rumah tangga adalah BPNT, sedangkan yang terendah adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dengan hanya 9,37 persen.

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih	Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka Kematian Bayi	Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)	Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.
Angka Kelahiran Total	Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.
Angka Kelahiran Kasar	Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
Angka Partisipasi Sekolah	Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.
Angka Putus Sekolah	Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Murni	Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.
Bekerja	Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Indeks Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha	Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoonesia (KBLI) dalam satu digit.
Masih Bersekolah	Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi ‘ Penduduk Usia Kerja Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
Penganggur	Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
Pengangguran Terbuka	Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah : a.yang mencari pekerjaan b.yang mempersiapkan usaha c.yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan d.yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Pengeluaran	Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup

Pekerja Tidak Dibayar	perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji
Perjalanan	Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin
Perkotaan	Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.
Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)	Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
Rasio Jenis Kelamin	Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Gizi	Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat berdasarkan Standar WHO/NCHS.
Status Pekerjaan	kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
Tamat Sekolah	Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.
Tingkat Partisipasi Angkatan	Kerja Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

SUMBER DATA

Sensus Penduduk (SP)	Sensus Penduduk (SP)	<p>Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.</p> <p>SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.</p>
Survei Ekonomi (SUSENAS)	Sosial Nasional	<p>Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul</p>

setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah :

- (a) Konsumsi/Pengeluaran
- (b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- (c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Pada Tahun 2019 Susenas dilaksanakan Semesteran.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2010 Sakernas dilakukan semesteran dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2011 - 2014 kembali dilakukan triwulanan yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Pada tahun 2019 Sakernas dilaksanakan Semesteran

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3, Cianjur,
Telp : (0263) 264762 , Fax : (0263) 264762
Homepage : <https://www.cianjurkab.go.id>
E-mail : bps3203@bps.go.id